



Peran Mekanisme Pengawasan dalam Memediasi Hubungan antara Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Subsidi Publik

Agostinho Coelho^{1*}, Julião Henriques Rodriques², Mateus Pinto³, Benigno Pereira⁴

¹⁻⁴ Faculty of Economics and Business, Universidade Nacional Timor Lorosa'e (UNTL), Dili, Timor

Korespondensi penulis: agostinhocoelho77@gmail.com

Abstract; *This study aims to analyze the mediating role of oversight mechanisms in the relationship between transparency and accountability in the management of public subsidies in Timor-Leste. The research addresses the gap that increased transparency does not automatically lead to substantive accountability without effective oversight. A quantitative explanatory approach was employed, using questionnaire data collected from 46 officials involved in public subsidy management at the Ministry of Higher Education, Science, and Culture of Timor-Leste. Data were analyzed using path analysis with SPSS software. The findings show that transparency has a positive and significant effect on oversight mechanisms ($\beta=0.739$) and on accountability ($\beta=0.837$). Oversight mechanisms also have a positive and significant effect on accountability ($\beta=0.594$) and fully mediate the relationship between transparency and accountability (indirect effect = 0.509). The implications confirm that transparency alone is insufficient to ensure accountable public subsidy governance without effective oversight systems. This study recommends strengthening internal and external oversight mechanisms, enhancing auditor capacity, and developing digital-based oversight to improve the effectiveness and credibility of public subsidy management in Timor-Leste.*

Keywords: *Accountability; Good Governance; Oversight Mechanisms; Public Subsidies; Transparency.*

Abstrak; Penelitian ini bertujuan menganalisis peran mekanisme pengawasan dalam memediasi hubungan antara transparansi dan akuntabilitas pengelolaan subsidi publik di Timor-Leste. Permasalahan penelitian berangkat dari kesenjangan bahwa peningkatan transparansi belum tentu menghasilkan akuntabilitas tanpa didukung pengawasan yang efektif. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan pengumpulan data melalui kuesioner terhadap 46 pejabat yang terlibat dalam pengelolaan subsidi publik pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Kebudayaan Timor-Leste. Data dianalisis menggunakan analisis jalur (*path analysis*) dengan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap mekanisme pengawasan ($\beta=0,739$) maupun terhadap akuntabilitas ($\beta=0,837$). Mekanisme pengawasan juga berpengaruh positif terhadap akuntabilitas ($\beta=0,594$) dan memediasi secara penuh hubungan antara transparansi dan akuntabilitas (pengaruh tidak langsung= $0,509$). Implikasi dari temuan ini menegaskan bahwa transparansi saja tidak cukup untuk menciptakan tata kelola subsidi publik yang akuntabel tanpa sistem pengawasan yang efektif. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal, peningkatan kapasitas auditor, serta pengembangan pengawasan berbasis digital guna meningkatkan efektivitas dan kredibilitas pengelolaan subsidi publik di Timor-Leste.

Kata kunci: Akuntabilitas; Good Governance; Mekanisme Pengawasan; Subsidi Publik; Transparan

1. LATAR BELAKANG

Pengelolaan subsidi publik merupakan salah satu instrumen penting dalam kebijakan fiskal pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, serta memperkuat akses masyarakat terhadap layanan dan kebutuhan dasar. Dalam praktiknya, subsidi publik tidak hanya berkaitan dengan distribusi anggaran negara, tetapi juga menyangkut aspek tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel. Di berbagai negara berkembang, pengelolaan subsidi publik masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya pengawasan, rendahnya kapasitas kelembagaan, kurang optimalnya sistem pengendalian internal, serta tingginya risiko penyalahgunaan anggaran.

Kondisi tersebut menyebabkan implementasi subsidi publik sering kali belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan (Allen et al., n.d.)

Timor-Leste sebagai negara yang masih berada dalam tahap penguatan tata kelola pemerintahan juga menghadapi berbagai persoalan dalam pengelolaan keuangan publik, khususnya pada sektor subsidi publik. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, belum optimalnya sistem audit internal, serta lemahnya mekanisme pengawasan birokrasi menjadi tantangan utama dalam mewujudkan pengelolaan subsidi yang transparan dan akuntabel. Meskipun pemerintah telah mendorong berbagai kebijakan reformasi administrasi publik, implementasi prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan subsidi publik masih menghadapi berbagai kendala administratif dan kelembagaan (Sahombu, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi belum tentu mampu menghasilkan akuntabilitas secara substantif apabila tidak didukung oleh sistem pengawasan yang efektif (Adrianti et al., 2023).

Dalam perspektif *good governance*, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan merupakan tiga elemen penting yang saling berkaitan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi mengandung makna keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi kepada masyarakat terkait proses pengambilan keputusan, penggunaan anggaran, serta pelaksanaan program publik. Melalui transparansi, masyarakat dapat melakukan kontrol sosial terhadap kinerja pemerintah sehingga potensi penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalkan (Setyawan & Lampung, 2025). Sementara itu, akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan seluruh kebijakan dan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat secara terbuka dan dapat diukur.

Akuntabilitas tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif dalam bentuk penyusunan laporan pertanggungjawaban, tetapi juga mencerminkan komitmen moral dan etis pemerintah dalam memastikan bahwa seluruh sumber daya publik digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan pembangunan. Dengan demikian, akuntabilitas menjadi indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik (Shokunbi, 2025). Namun demikian, penerapan transparansi dan akuntabilitas tidak akan berjalan optimal tanpa adanya mekanisme pengawasan yang memadai.

Pengawasan memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan penggunaan anggaran publik berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, prinsip efisiensi, dan tujuan pembangunan. Pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol

administratif, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan, serta praktik korupsi dalam pengelolaan keuangan negara (Augustine, 2025). Oleh karena itu, efektivitas pengawasan menjadi faktor penting dalam memperkuat hubungan antara transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola sektor publik.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan adanya hubungan antara transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Penelitian (Swandewi & Dewi, 2023) menemukan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Riau. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas tata kelola anggaran memerlukan dukungan sistem pengawasan dan keterbukaan informasi yang efektif. Penelitian (Original et al., 2023) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Banjarmasin juga menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas mampu meningkatkan kinerja anggaran melalui efektivitas anggaran sebagai variabel mediasi. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa transparansi tidak selalu secara langsung menghasilkan akuntabilitas, tetapi memerlukan faktor perantara yang memperkuat hubungan antarvariabel tersebut.

Selain itu, penelitian (Aulia et al., 2024) pengelolaan anggaran daerah di Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan berpengaruh positif terhadap kualitas pengelolaan anggaran daerah. Penelitian tersebut menegaskan bahwa pengawasan memiliki peranan penting dalam menciptakan tata kelola keuangan publik yang efektif. Dalam konteks internasional, (Laoli & Si, 2019) menjelaskan bahwa keberadaan lembaga pengawasan fiskal independen di Uni Eropa mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas fiskal pemerintah melalui mekanisme pengawasan yang kuat. Sementara itu, (Nina et al., 2024) menemukan bahwa peningkatan transparansi administratif di Italia belum sepenuhnya menghasilkan akuntabilitas substantif akibat lemahnya pengawasan dan budaya integritas birokrasi.

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Aulia et al., 2024) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dan transparansi pengelolaan keuangan daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian tersebut menegaskan bahwa efektivitas pengawasan internal mampu memperkuat implementasi *good governance* dalam pengelolaan keuangan publik. Selain itu, (Indriani & Mulyany, 2024) menjelaskan bahwa tren audit dan pengawasan publik berpengaruh signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas sektor publik di negara berkembang melalui penguatan sistem kontrol, audit, dan kepatuhan administrasi publik.

Selanjutnya, penelitian (Olatinsu & Eke, 2025) menemukan bahwa efektivitas sistem audit internal dan jejak audit digital (*audit trails*) mampu meningkatkan transparansi keuangan serta memperkuat pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan publik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi pengawasan dan audit internal menjadi instrumen penting dalam memperkuat akuntabilitas sektor publik modern. Penelitian (Fernanda, 2025) juga menegaskan bahwa transparansi laporan keuangan pemerintah daerah tidak hanya membutuhkan keterbukaan informasi, tetapi juga didukung oleh mekanisme audit dan pengawasan internal yang efektif agar mampu menghasilkan akuntabilitas publik secara substantif.

Lebih lanjut, (Celestin et al., 2024) menjelaskan bahwa praktik *smart audit* dan pengawasan berbasis teknologi dalam administrasi publik dapat meningkatkan transparansi dan efektivitas pengawasan pemerintah. (Fernanda, 2025) menyatakan bahwa penguatan mekanisme pengendalian internal merupakan langkah penting dalam mencegah korupsi, meningkatkan transparansi fiskal, serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan publik pada organisasi pemerintah daerah.

Berbagai penelitian menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai elemen utama tata kelola pemerintahan, sementara pengawasan cenderung diposisikan sebagai faktor pendukung. Padahal, dalam perspektif administrasi publik modern, pengawasan memiliki peran strategis sebagai mekanisme yang menjelaskan bagaimana transparansi dapat menghasilkan akuntabilitas secara substantif. Transparansi hanya menyediakan keterbukaan informasi, sedangkan pengawasan memastikan informasi tersebut diverifikasi, dikendalikan, dan dievaluasi sehingga mendorong kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas anggaran, dan tanggung jawab pemerintah kepada publik.

Kajian terdahulu umumnya berfokus pada pengaruh langsung transparansi terhadap akuntabilitas atau kinerja anggaran, sementara pengawasan lebih sering diperlakukan sebagai variabel independen. Perkembangan pendekatan *process-oriented governance* menunjukkan bahwa akuntabilitas terbentuk melalui mekanisme kelembagaan yang menghubungkan keterbukaan informasi dengan pertanggungjawaban publik. Namun, penelitian yang menguji pengawasan sebagai variabel mediasi dalam pengelolaan subsidi publik masih terbatas, terutama pada negara berkembang dengan kapasitas kelembagaan yang belum kuat, seperti Timor-Leste.

Kondisi tersebut menjadi relevan mengingat Timor-Leste masih menghadapi tantangan dalam kapasitas birokrasi, pengawasan administrasi, dan pengelolaan keuangan negara. Di sisi

lain, sektor subsidi publik memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap penyalahgunaan anggaran, inefisiensi birokrasi, dan lemahnya kontrol administratif.

Berdasarkan latar tersebut, penelitian ini mengembangkan model yang menempatkan pengawasan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan subsidi publik. Penelitian ini tidak hanya menguji hubungan langsung antarvariabel, tetapi juga menjelaskan mekanisme institusional yang memungkinkan transparansi menghasilkan akuntabilitas melalui efektivitas pengawasan. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian *good governance*, khususnya terkait relasi transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas sektor publik. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi dasar rekomendasi bagi pemerintah Timor-Leste dalam memperkuat sistem pengawasan administrasi dan pengelolaan subsidi publik guna meningkatkan efektivitas anggaran dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

2. KAJIAN TEORITIS

Transparansi dalam Pengelolaan Subsidi Publik

Transparansi merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) karena mencerminkan keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Transparansi tidak hanya berkaitan dengan keterbukaan data anggaran, tetapi juga menyangkut keterbukaan proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, hingga evaluasi program publik. Dalam konteks pengelolaan subsidi publik, transparansi menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa seluruh proses distribusi subsidi dilakukan secara adil, tepat sasaran, dan bebas dari praktik penyimpangan anggaran (Setyawan & Lampung, 2025)..

Menurut perspektif *good governance*, transparansi memungkinkan masyarakat memperoleh akses terhadap informasi mengenai alokasi anggaran subsidi, mekanisme penyaluran bantuan, prosedur administrasi, hingga laporan realisasi penggunaan dana publik. Keterbukaan informasi tersebut mendorong terciptanya kontrol sosial yang dapat meminimalkan risiko korupsi, nepotisme, manipulasi data penerima manfaat, dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan subsidi publik (Semarang, 2026) Selain itu, transparansi juga meningkatkan legitimasi kebijakan pemerintah karena masyarakat dapat menilai sejauh mana program subsidi dilaksanakan secara efektif dan sesuai kebutuhan publik.

Secara teoritis, transparansi dapat dijelaskan melalui *agency theory* yang menempatkan pemerintah sebagai *agent* dan masyarakat sebagai *principal*. Dalam hubungan tersebut,

pemerintah memiliki kewajiban moral dan administratif untuk menyampaikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat guna mengurangi *information asymmetry*. Ketika informasi terkait pengelolaan subsidi tidak tersedia secara terbuka, maka peluang terjadinya moral hazard dan penyalahgunaan anggaran akan semakin besar. Sebaliknya, semakin tinggi tingkat transparansi yang diterapkan pemerintah, maka semakin besar pula peluang terciptanya pengawasan publik yang efektif dan akuntabilitas yang kuat dalam pengelolaan subsidi public (Rossieta, 2026).

Perkembangan digitalisasi pemerintahan (*digital governance*) juga memperkuat implementasi transparansi melalui penggunaan sistem informasi publik, *e-budgeting*, *e-audit*, dan portal keterbukaan data pemerintah. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan masyarakat mengakses informasi subsidi secara real time sehingga meningkatkan efektivitas pengawasan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Oleh karena itu, transparansi tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai strategi pemerintah dalam membangun tata kelola subsidi publik yang kredibel, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Mekanisme Pengawasan dalam Tata Kelola Subsidi Publik

Mekanisme pengawasan merupakan bagian penting dalam sistem pengendalian administrasi publik yang bertujuan memastikan bahwa seluruh kebijakan dan penggunaan anggaran negara berjalan sesuai dengan regulasi, prosedur, dan tujuan pembangunan. Dalam pengelolaan subsidi publik, pengawasan memiliki fungsi strategis untuk mencegah terjadinya penyimpangan, mendeteksi kesalahan administrasi, serta memastikan bahwa subsidi benar-benar diterima oleh kelompok sasaran yang berhak (Faisal, 2025).

Pengawasan dalam sektor publik dapat dilakukan melalui pengawasan internal maupun eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh unit pengendalian internal pemerintah, auditor internal, dan sistem administrasi birokrasi yang bertugas memastikan kepatuhan terhadap prosedur pengelolaan keuangan negara. Sementara itu, pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga audit independen, parlemen, media massa, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebijakan public (Boufounou et al., 2024).

Menurut *organizational control theory*, pengawasan merupakan mekanisme kontrol yang diperlukan untuk memastikan bahwa aktivitas organisasi berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks subsidi publik, pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai alat pemeriksaan administratif, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi kebijakan untuk

meningkatkan efektivitas distribusi subsidi dan kualitas pelayanan publik. Pengawasan yang efektif mampu memperkuat integritas birokrasi, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta meminimalkan risiko korupsi dan penyalahgunaan anggaran publik.

Perkembangan teknologi informasi juga mendorong transformasi sistem pengawasan menuju pengawasan berbasis digital (*digital oversight*). Sistem seperti *audit trails*, *e-monitoring*, dan *smart audit systems* memungkinkan pemerintah melakukan pengawasan secara lebih cepat, akurat, dan transparan (Celestin et al., 2024; Olatinsu & Eke, 2025). Pengawasan berbasis teknologi memberikan kemampuan untuk mendeteksi penyimpangan anggaran secara dini, meningkatkan akurasi data subsidi, dan memperkuat efektivitas pengendalian internal pemerintah.

Dalam perspektif administrasi publik modern, pengawasan tidak hanya diposisikan sebagai fungsi kontrol, tetapi juga sebagai mekanisme kelembagaan yang menjembatani hubungan antara transparansi dan akuntabilitas. Transparansi hanya menyediakan informasi, sedangkan pengawasan memastikan bahwa informasi tersebut diverifikasi, dianalisis, dan digunakan sebagai dasar evaluasi kebijakan publik. Oleh karena itu, efektivitas pengawasan menjadi faktor penting dalam menciptakan tata kelola subsidi publik yang transparan dan akuntabel.

Akuntabilitas Pengelolaan Subsidi Publik

Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan seluruh tindakan, kebijakan, dan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat secara terbuka, terukur, dan sesuai dengan ketentuan hukum (Akuntabilitas et al., 2011). Dalam sektor publik, akuntabilitas menjadi indikator utama dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan karena mencerminkan tingkat tanggung jawab pemerintah terhadap pelaksanaan program publik dan penggunaan anggaran Negara (Rossieta, 2026).

Dalam pengelolaan subsidi publik, akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban terhadap efektivitas program subsidi, ketepatan sasaran penerima manfaat, efisiensi penggunaan anggaran, serta pencapaian tujuan kebijakan publik. Akuntabilitas yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperkuat legitimasi kebijakan subsidi yang dijalankan (Kushartiningsih & Riharjo, 2021).

Menurut perspektif *stewardship theory*, pejabat publik dipandang sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab moral untuk mengelola sumber daya negara demi kepentingan masyarakat. Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya dipahami sebagai kewajiban

administratif, tetapi juga sebagai bentuk komitmen etis pemerintah dalam menjalankan tata kelola publik secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab.

Akuntabilitas dalam pengelolaan subsidi publik dapat diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan yang transparan, sistem audit yang efektif, kepatuhan terhadap regulasi, serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program subsidi. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi kebijakan juga menjadi elemen penting dalam memperkuat akuntabilitas publik.

Dalam konteks negara berkembang seperti Timor-Leste, tantangan utama dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan subsidi publik meliputi lemahnya kapasitas kelembagaan, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya sistem pengendalian internal, serta belum optimalnya digitalisasi administrasi public (Akuntabilitas & Safitri, n.d.). Oleh karena itu, penguatan transparansi dan mekanisme pengawasan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas sektor publik.

Good Governance

Good governance merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang menekankan penerapan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Konsep ini berkembang sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat demokrasi dalam administrasi negara (Boufounou et al., 2024).

Menurut United Nations, good governance merupakan proses pengelolaan sumber daya publik yang dilakukan secara bertanggung jawab, transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam konteks negara berkembang, penerapan good governance menjadi sangat penting karena berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas institusi publik dan mengurangi praktik korupsi (Ogan et al., 2024).

Dalam pengelolaan subsidi publik, penerapan prinsip good governance diperlukan agar subsidi dapat disalurkan secara adil, tepat sasaran, dan efisien. Transparansi memungkinkan masyarakat mengetahui proses pengelolaan subsidi, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas hasil kebijakan yang dijalankan. Mekanisme pengawasan berfungsi sebagai instrumen kontrol untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara efektif.

Hubungan Transparansi, Mekanisme Pengawasan, dan Akuntabilitas

Secara konseptual, transparansi, mekanisme pengawasan, dan akuntabilitas merupakan elemen yang saling berkaitan dalam kerangka *good governance*. Transparansi menyediakan

keterbukaan informasi kepada publik, pengawasan memastikan bahwa informasi tersebut diverifikasi dan dikendalikan, sedangkan akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan kebijakan public (Shokunbi, 2025).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa transparansi memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas karena keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah. Namun demikian, transparansi tidak selalu secara langsung menghasilkan akuntabilitas substantif apabila tidak didukung oleh sistem pengawasan yang efektif. Dalam kondisi tersebut, mekanisme pengawasan berfungsi sebagai variabel mediasi yang memperkuat hubungan antara transparansi dan akuntabilitas.

Dalam pengelolaan subsidi publik, pengawasan yang efektif memungkinkan proses audit, monitoring, evaluasi, dan pengendalian kebijakan berjalan secara optimal sehingga informasi yang tersedia melalui transparansi dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan administrasi dan kualitas pertanggungjawaban publik. Oleh karena itu, penguatan pengawasan internal maupun eksternal menjadi faktor strategis dalam menciptakan tata kelola subsidi publik yang efektif, efisien, transparan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori untuk menganalisis pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan subsidi publik dengan mekanisme pengawasan sebagai variabel mediasi. Penelitian dilaksanakan pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Kebudayaan Timor-Leste karena institusi tersebut memiliki peran strategis dalam pengelolaan subsidi publik.

Populasi penelitian mencakup seluruh pegawai dan pejabat yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pengawasan subsidi publik pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Kebudayaan Timor-Leste. Teknik pengambilan sampel menggunakan saturated sampling (sampling jenuh), yaitu seluruh anggota populasi dijadikan responden penelitian karena jumlah populasi relatif terbatas. Dengan demikian, jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 46 responden.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert lima poin kepada responden penelitian. Instrumen penelitian disusun berdasarkan indikator transparansi, mekanisme pengawasan, dan akuntabilitas yang diadaptasi dari penelitian terdahulu dan disesuaikan dengan konteks pengelolaan subsidi publik di Timor-Leste. Data sekunder diperoleh melalui

studi dokumentasi terhadap laporan audit, laporan akuntabilitas instansi pemerintah, regulasi subsidi publik, dan dokumen administratif lainnya yang relevan dengan penelitian.

Teknik analisis data menggunakan Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Tahapan analisis meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis jalur (path analysis), dan uji mediasi. Analisis jalur digunakan untuk menguji pengaruh langsung dan tidak langsung antara transparansi, mekanisme pengawasan, dan akuntabilitas. Pengujian hipotesis dilakukan berdasarkan nilai koefisien jalur dan tingkat signifikansi dengan kriteria $p < 0,05$.

Variabel penelitian terdiri atas transparansi sebagai variabel independen, mekanisme pengawasan sebagai variabel mediasi, dan akuntabilitas sebagai variabel dependen. Hipotesis penelitian meliputi pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas, pengaruh transparansi terhadap mekanisme pengawasan, pengaruh mekanisme pengawasan terhadap akuntabilitas, serta peran mediasi mekanisme pengawasan dalam hubungan antara transparansi dan akuntabilitas pengelolaan subsidi publik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Kebudayaan Timor-Leste dengan fokus pada pengelolaan subsidi publik. Pengumpulan data dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner kepada seluruh responden yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pengawasan subsidi publik. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 46 orang yang terdiri atas pejabat struktural, staf administrasi keuangan, dan pegawai yang terlibat dalam pengelolaan subsidi publik.

Karakteristik Responden

Karakteristik responden diperlukan untuk memberikan gambaran mengenai profil subjek penelitian. Deskripsi responden dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan lama bekerja.

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	28	60,9
	Perempuan	18	39,1
Usia	21–30 Tahun	10	21,7
	31–40 Tahun	19	41,3
	> 40 Tahun	17	37,0
Pendidikan	Sarjana	30	65,2
	Magister	16	34,8
Lama Bekerja	< 5 Tahun	12	26,1
	5–10 Tahun	20	43,5

> 10 Tahun 14 30,4

Sumber: Data penelitian diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 1, sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki dengan persentase sebesar 60,9%. Mayoritas responden berada pada rentang usia 31–40 tahun dengan tingkat pendidikan dominan sarjana. Selain itu, sebagian besar responden memiliki pengalaman kerja antara 5–10 tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa responden memiliki pengalaman dan pemahaman yang memadai mengenai pengelolaan subsidi publik.

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui gambaran umum jawaban responden terhadap variabel penelitian yang meliputi transparansi, mekanisme pengawasan, dan akuntabilitas.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Transparansi	3,10	4,85	4,12	0,54
Mekanisme Pengawasan	2,95	4,90	4,05	0,61
Akuntabilitas	3,00	4,80	4,18	0,49

Sumber: Data penelitian diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 2, variabel akuntabilitas memiliki nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,18 yang menunjukkan bahwa responden menilai pelaksanaan akuntabilitas dalam pengelolaan subsidi publik berada pada kategori baik. Variabel transparansi memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,12, sedangkan mekanisme pengawasan memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dan sistem pengawasan dalam pengelolaan subsidi publik telah berjalan cukup baik meskipun masih memerlukan penguatan pada beberapa aspek administratif dan kelembagaan.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, instrumen penelitian diuji melalui uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan bahwa seluruh item pernyataan mampu mengukur variabel penelitian secara tepat dan konsisten.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	Rentang Validitas (r)	Cronbach's Alpha
Transparansi	8	0,612 – 0,790	0,835
Mekanisme Pengawasan	9	0,441 – 0,865	0,895
Akuntabilitas	10	0,459 – 0,788	0,832

Sumber: Data penelitian diolah (2026)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan memiliki nilai korelasi di atas nilai kritis ($r > 0,294$), sehingga seluruh indikator dinyatakan valid. Selain itu, seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas 0,60 yang menunjukkan bahwa instrumen penelitian reliabel dan layak digunakan dalam analisis lebih lanjut.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi persyaratan statistik sebelum dilakukan pengujian hipotesis.

Tabel 4. Hasil Uji Asumsi Klasik

Jenis Uji	Hasil	Keterangan
Normalitas	Sig. = 0,200	Data berdistribusi normal
Multikolinearitas	VIF < 10	Tidak terjadi multikolinearitas
Heteroskedastisitas	Sig. > 0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data penelitian diolah (2026)

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4, data penelitian dinyatakan memenuhi asumsi normalitas karena memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Selain itu, hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai VIF di bawah 10 sehingga tidak terdapat hubungan linear yang tinggi antarvariabel independen. Hasil uji heteroskedastisitas juga menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis jalur (*path analysis*) untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung antarvariabel penelitian.

Tabel 5. Hasil Analisis Jalur dan Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Hubungan Antarvariabel	β	Sig.	Keputusan
H1	Transparansi $\rightarrow$ Akuntabilitas	0,837	0,000	Diterima
H2	Transparansi $\rightarrow$ Mekanisme Pengawasan	0,739	0,000	Diterima
H3	Mekanisme Pengawasan $\rightarrow$ Akuntabilitas	0,594	0,000	Diterima
H4	Transparansi $\rightarrow$ Pengawasan $\rightarrow$ Akuntabilitas	0,509	0,000	Mediasi penuh

Sumber: Data penelitian diolah (2026)

Hasil analisis menunjukkan bahwa transparansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,837 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Transparansi juga memiliki pengaruh positif terhadap mekanisme pengawasan dengan nilai koefisien sebesar 0,739. Selanjutnya, mekanisme pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dengan nilai koefisien sebesar 0,594.

Hasil uji mediasi menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan memediasi hubungan antara transparansi dan akuntabilitas dengan nilai pengaruh tidak langsung sebesar 0,509.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa transparansi akan lebih efektif dalam meningkatkan akuntabilitas apabila didukung oleh sistem pengawasan yang berjalan secara optimal.

Hasil uji mediasi menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan memediasi hubungan antara transparansi dan akuntabilitas dengan nilai pengaruh tidak langsung sebesar 0,509. Temuan tersebut menunjukkan bahwa transparansi akan lebih efektif dalam meningkatkan akuntabilitas apabila didukung oleh sistem pengawasan yang berjalan secara optimal.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi memiliki peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan subsidi publik pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Kebudayaan Timor-Leste. Keterbukaan informasi terkait anggaran, distribusi subsidi, dan laporan penggunaan dana memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana subsidi dikelola dan dimanfaatkan. Kondisi ini mendorong terciptanya pertanggungjawaban yang lebih jelas dari pemerintah kepada publik. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa transparansi bukan hanya berkaitan dengan penyediaan informasi, tetapi juga menjadi sarana membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Utomo & Nawangsari, 2025) yang menegaskan bahwa transparansi menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan terpercaya.

Penelitian ini juga menemukan bahwa transparansi berkontribusi terhadap penguatan mekanisme pengawasan. Informasi yang terbuka memudahkan proses pemantauan, evaluasi, dan audit terhadap penggunaan subsidi publik sehingga potensi penyimpangan dapat lebih cepat teridentifikasi. Dalam perspektif *agency theory*, keterbukaan informasi membantu mengurangi kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat sehingga pengawasan dapat berjalan lebih efektif. Temuan ini didukung oleh (Nabila et al., 2025) yang menjelaskan bahwa transparansi sektor publik berperan dalam menekan potensi korupsi dan meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan negara. Selain itu, mekanisme pengawasan terbukti berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas karena pengawasan yang berjalan baik mampu memastikan bahwa penggunaan subsidi tetap sesuai dengan aturan, tujuan program, dan prosedur administrasi yang berlaku. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Gultom, 2023), yang menegaskan pentingnya audit internal dan pengawasan administrasi dalam memperkuat akuntabilitas sektor publik.

Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan mampu memperkuat hubungan antara transparansi dan akuntabilitas. Artinya, keterbukaan informasi

akan memberikan dampak yang lebih nyata apabila didukung oleh sistem pengawasan yang efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks Timor-Leste, tantangan seperti keterbatasan kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, dan belum optimalnya digitalisasi administrasi masih memengaruhi efektivitas pengawasan subsidi publik. (Novita et al., 2022), (Hasugian et al., 2021) menjelaskan bahwa penerapan digitalisasi administrasi dan pengawasan berbasis *smart governance* dapat meningkatkan akses informasi publik dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas institusi pengawas, peningkatan kompetensi aparatur, serta pengembangan sistem pengawasan digital menjadi langkah penting untuk mendukung pengelolaan subsidi publik yang lebih transparan dan akuntabel.

DAFTAR REFERENSI

- Adrianti, A., Sumarlin, S., & Anwar, P. H. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi Di Kabupaten Gowa. *Income Journal.*, 2(1), 33–44. <https://doi.org/10.61911/income.v2i1.29>
- Akuntabilitas, P., Pengawasan, D. A. N., Pengelolaan, T., & Desa, D. (2011). *Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa.*
- Akuntabilitas, P., & Safitri, D. D. (n.d.). (*Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surabaya*).
- Allen, R., Rayess, M. El, Doherty, L., & Goel, P. (n.d.). *WP / 20 / 183 Review of the Public Financial Management Reform Strategy for Pacific Island Countries , 2010-2020.*
- Augustine, A. A. (2025). *International Journal of Management and Economics Auditing in Local Governments : Panacea for Accountability , Transparency , and Ethical Standards in Grassroots Governance and Service delivery in the 21 st Century.* 11(03), 4124–4135. <https://doi.org/10.47191/ijmei/v11i3.15>
- Aulia, Y., Pembangunan, U., Budi, P., Sari, D., Hasibuan, B., Pembangunan, U., Budi, P., Waruwu, H., Pembangunan, U., Budi, P., Gulo, P. D., Pembangunan, U., Budi, P., Nurhaliza, S., Pembangunan, U., & Budi, P. (2024). *Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di kabupaten deli serdang.* 2(2), 79–86.
- Boufounou, P., Eriotis, N., Kounadeas, T., Argyropoulos, P., & Pouloupoulos, J. (2024). *Enhancing Internal Control Mechanisms in Local Government Organizations : A Crucial Step towards Mitigating Corruption and Ensuring Economic Development.*
- Celestin, M., Anna, A., Arts, G., Bharathidasan, C., & Nadu, T. (2024). *Forecasting Public Sector Accountability : Analyzing and Predicting Audit Trends in Rwanda ' s Financial Management (2020-2030).* 01(01), 23–32.
- Faisal, H. (2025). *Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.* VIII(3), 460–484.
- Fernanda, I. A. (2025). *Peran Kecerdasan Buatan (AI) Dalam Meningkatkan Audit Forensik Untuk Mendeteksi Kecurangan : Tinjauan Literatur Sistematis.* 9, 3430–3442.
- Gultom, L. L. (2023). *Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah , Value For Money , Kejujuran , Transparansi dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.* 2(9), 1–20.
- Hasugian, F. T. S. P., Syahputra, R. A., & Harahap, A. R. (2021). *Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah , Value For Money , Kejujuran , Transparansi , Dan Pengawasan*

- Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kajian Pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Pusat).* 6(2), 175–185.
- Indriani, M., & Mulyany, R. (2024). Enhancing fraud prevention and internal control : the key role of internal audit in public sector governance. *Cogent Business & Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2382389>
- Kushartiningsih, R., & Riharjo, I. B. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* , 10(3), 1–18.
- Laoli, V., & Si, M. (2019). *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Pemerintah Kabupaten Nias*. 3.
- Nabila, P., Maulina, I., Islam, U., Sultanah, N., Lhokseumawe, N., Governance, G., & Kinerja, A. (2025). *EFEKTIVITAS AUDIT KINERJA SEKTOR PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE*. 5(1), 1–10.
- Nina, I., Barus, E., & Djamhuri, A. (2024). *Measurement of government performance in literature review*. 8(13), 1–20.
- Niu, X., Wang, L., & Yang, X. (2019). A comparison study of credit card fraud detection: Supervised versus unsupervised. *ArXiv Preprint ArXiv:1904.10604*. <https://arxiv.org/abs/1904.10604>
- Novita, K., Rahayu, S., Gede, L., Dewi, K., & Ekonomi, J. (2022). *Pengaruh transparansi dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah buleleng*. 2017, 464–471.
- Ogan, P. T., District, O. I., & Fahlevi, A. H. (2024). *Implementation of Good Corporate Governance (GCG) Principles in*. 187–405. <https://doi.org/10.23920/jphp.v1i2.292.1>
- Olatinsu, O., & Eke, C. (2025). *Audit trails , financial transparency , and internal control effectiveness in public financial management systems*. 7(2), 1352–1363.
- Original, T., Bericht, D., & Eur, R. (2023). *Erneuerung des Bekenntnisses zur Stärkung der Gesundheitssysteme für eine allgemeine Gesundheitsversorgung , bessere gesundheitliche Resultate und den Abbau gesundheitlicher Ungleichheiten*. September.
- Rossieta, H. (2026). *Transparency of local government in Indonesia*. 3(1), 123–138. <https://doi.org/10.1108/AJAR-07-2018-0019>
- Sahombu, J. M. (2025). *The Analysis of the Implementation of Good Financial Governance in Public Sector Financial Management in Timor Leste*. 5(04), 862–870. <https://doi.org/10.58471/jms.v5i04>
- Semarang, J. (2026). *DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)*. 2026, 551921.
- Setyawan, W., & Lampung, P. N. (2025). *Bridging Between Financial Performance and Government Performance : The Role of Public Sector Accounting in Realizing Good Governance*. 2(2).
- Shokunbi, T. (2025). *Fiscal Transparency and Citizen Trust : Evaluating the Role of Budget Accountability Mechanisms in Developing Democracies*. 01(04). <https://doi.org/10.64235/a2655d87>
- Swandewi, K. D., & Dewi, N. A. W. T. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, dan Partisipasi Publik Terhadap Pengelolaan APBD Pada SKPD Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 14(04), 1132–1143. <https://doi.org/10.23887/jimat.v14i04.50776>
- Utomo, N. K., & Nawangsari, A. T. (2025). *Transparansi dan Akuntabilitas Sektor Publik : Pilar Utama dalam Good Governance*. 8(2), 103–109.